

TAJUK RENCANA

Relokasi PKL Malioboro

PROSES relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro sudah dimulai. Dua tempat yang disediakan, yaitu eks Gedung Bioskop Indra (namanya Teras Malioboro 1) dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY (Teras Malioboro 2), sudah diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Rabu (26/1). Artinya, kedua tempat relokasi tersebut memang sudah siap ditempati. Sedangkan pemindahan pedagang akan dilakukan secara bertahap, mengingat jumlah PKL Malioboro cukup banyak, yaitu 1.838 PKL.

Relokasi PKL merupakan bagian dari proses panjang penataan kawasan Malioboro. Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, pihaknya sudah menunggu sampai 18 tahun untuk melakukan relokasi PKL Malioboro. 18 tahun bukan waktu yang pendek. Karena itu meski ada sebagian PKL yang meminta agar relokasi ditunda sampai lebaran mendatang, bahkan juga mendatangi DPRD DIY, permintaan itu dengan berat tidak dipenuhi.

Bisa dimaklumi, setiap relokasi pedagang di mana saja pasti menimbulkan berbagai kekhawatiran. Termasuk kemungkinan omsetnya akan turunnya omset penjualan. Tetapi itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Memang perlu masa transisi. Tetapi setelah kondisi stabil, perolehan omsetpun akan pulih kembali, bahkan tidak menutip kemungkinan untuk meningkat. Apalagi kalau relokasi dilakukan sekarang, saat libur lebaran mendatang diprediksi kondisi sudah stabil.

Terkait relokasi PKL Malioboro, Pemda DIY tampaknya juga melakukan berbagai antisipasi mengenai hal ini. Antara lain dengan membuat kebijakan membebaskan retribusi selama setahun. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Sri Nurkatsiwi, para PKL juga akan mendapatkan fasilitas kebutuhan primer seperti listrik, air, jaringan internet, tempat sampah serta diberikan lapak gratis.

Sementara itu untuk promosi, yang rencananya akan dilakukan bersama-

sama oleh pihak pemerintah, PKL dan pihak lain untuk mendatangkan pengunjung ke Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2, kiranya tidak sulit. Sebab, Malioboro sudah menjadi ikon Yogya. Selain lokasinya di jantung kota, sudah tercipta *image* bahwa berkunjung ke Yogya tidak lengkap kalau tidak ke Malioboro. Dengan begitu, pengunjung Malioboro akan tetap banyak dan tinggal mengarahkan di mana tempat beli oleh-oleh atau pusat jajanan. Yang penting, citra baik ini jangan sampai dikotori, atau dirusak, misalnya ada yang memungut biaya parkir di luar kewajaran atau *nuthuk* ketika ada wisatawan belanja, sehingga membuat mereka *kapok*.

Di era digital saat ini, untuk melakukan promosi juga sangat mudah. Setiap PKL bisa mempromosikan sendiri-sendiri jenis usahanya, termasuk lebihhannya sebagai daya tarik, melalui media sosial (medsos). Kita yakin para PKL Malioboro memiliki gadget yang mendukung untuk itu. Melalui HP android yang dimiliki, setiap saat mereka masing-masing bisa terus mengupdate informasi terkait dagangannya melalui medsos, bahkan juga bisa melakukan jual beli secara online. Sehingga untuk saat ini, tempat fisik berjalan sering dianggap sudah tidak begitu penting lagi. Meski memiliki tempat di lokasi tidak strategis, di tengah pemukiman misalnya, namun omset penjualannya bisa tetap tinggi.

Selasar Malioboro memang seharusnya tidak digunakan PKL untuk berjalan. Selasar dan Lorong-lorong tersebut juga bukan milik PKL, tetapi yang mempunyai pemilik toko dan Pemda DIY. Karena itu sudah semestinya kalau Pemda merelokasi PKL dari jalur pedestrian Malioboro. Yang penting, setelah semua direlokasi, pemilik toko jangan lantas memajang dagangannya di selasar tersebut. Selain itu juga harus ketat jangan muncul PKL baru di kawasan tersebut. Jadi, trotoar di Malioboro nanti benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya. □

Pendidikan Pancasila dan Masyarakat

APAKAH dengan telah tertulisnya Pancasila sebagai dasar negara, dengan sendirinya seluruh nilai-nilai yang ada di dalamnya terwujud dalam kehidupan bangsa dan negara? Jika kita menyimak dengan seksama pandangan yang disampaikan Presiden Sukarno (Bung Karno) dalam berbagai kesempatan, tidak terkecuali 1 Juni 1945, maka kita akan mendapatkan jawaban: Tidak! Bung Karno mengajarkan, bahwa dibutuhkan perjuangan, agar nilai-nilai Pancasila mewujudkan nyata dalam kehidupan. Perjuangan yang dimaksud tentunya berbeda bentuknya dengan perjuangan mengusir bangsa. Suatu perjuangan, membangun bangsa dengan dasar Pancasila.

Partisipasi Masyarakat

Dalam kursus tentang Pancasila di istana Negara pada 26 Mei 1958, Presiden Sukarno mengatakan: “... *perjuangan Bangsa Indonesia hanyalah dapat berhasil, jikalau seluruh rakyat Indonesia masuk di dalam satu kancah perjuangan.*” Hal ini berarti: (1) setiap orang menyadari kedudukannya sebagai warga negara yang pada dirinya punya tanggung jawab kewarganegaraan; (2) setiap orang mempunyai kesanggupan untuk menjadi bagian dari proses pembangunan bangsa, sesuai dengan kemampuannya.

Kesadaran dan kemampuan warga akan dimungkinkan ada, jika: (1) tersedia kerangka hukum yang memberikan keabsahan bagi keterlibatan seluruh masyarakat; (2) tersedia ruang kesempatan yang secara khusus diadakan untuk agar warga dapat meningkatkan kualitas kemampuannya dalam ambil bagian untuk membangun negerinya. Tentu yang menjadi tantangan adalah bagaimana menghadirkan keduanya sebagai suatu kebijakan yang juga merupakan produk dari partisipasi masyarakat.

Jika kita kembali pada pernyataan bahwa untuk mencapai cita-cita luhur kemerdekaan, dibutuhkan suatu perjuangan waktu antara keadaan sekarang dan keadaan yang diharapkan. Artinya tidak ada suatu usaha yang bersifat instan. Dalam keadaan itu, hal yang dapat di-

HM Idham Samawi

upaya adalah menyusun kesiapan warga. Yang dimaksud adalah upaya sehingga setiap warga menyadari kedudukannya, hak dan tanggung jawabnya, tantangan dan harapan bangsa. Untuk sampai pada keadaan tersebut, kita membutuhkan suatu pendidikan, yakni pendidikan Pancasila. Pendidikan yang dimaksud sudah barang tentu merupakan pendidikan yang pada



KR-JOKO SANTOSO

dirinya merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila.

Kita menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Januari 2022. Di dalamnya memuat ketentuan yang mengatur Pancasila sebagai mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun di perguruan tinggi. Ketentuan ini dapat dikatakan telah menjawab kebutuhan pendidikan Pancasila. Namun demikian, kita membutuhkan pendidikan yang melampaui kelas pembelajaran formal. Suatu pendidikan yang dapat menjangkau ruang keluarga dan masyarakat.

Penutup

Pendidikan Pancasila yang bersifat komprehensif, meliputi pembelajaran di ruang-ruang belajar formal, di ruang-ruang keluarga, dan di ruang-ruang komunitas, serta interaksi pembelajaran antar-ruang-ruang tersebut, membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat (seluruh elemen bangsa) untuk menghadirkannya. Untuk itu, nampaknya diperlukan: (1) penyelenggaraan pendidikan di kelas-kelas formal secara baik dan benar. Sehingga mampu melahirkan warga negara yang mengerti dan sanggup mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (2) Dengan hasil pertama (1), dapat diharapkan terpicunya pembelajaran di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang komunitas yang diinisiasi dan difasilitasi oleh pelajar Pancasila.

Dengan kesemuanya itu, kita dapat berharap terselenggaranya suatu pembelajaran masif yang tidak hanya melibatkan institusi pendidikan akan tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas. Proses pembelajaran tersebut sudah barang tentu tidak bersifat satu arah dan eksklusif, melainkan bersifat multiarah dan inklusif. Masalah-masalah yang ada di masyarakat akan menjadi bagian dari bahan pembelajaran dan termasuk cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Lewat proses ini, seluruh bangsa akan dengan sendirinya ambil bagian dalam proses memastikan seluruh pergerakan bangsa menuju apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan. □

**) HM Idham Samawi, Anggota DPR RI*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pentingnya Pengawasan Kehalalan Ayam Potong

Henny K Hendrasty

pat dirancang analisis titik – titik kritis atau titik – titik kendali halal (TK). Baik pada proses, bahan maupun alat yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun SOP-nya. Dalam hal ini konsep *Hazard Analysis Critical Control Points* (HACCP) dapat diadopsi untuk mengidentifikasi titik-titik halal yang harus dikendalikan (*Halal Control Points*, HCP's).

Titik kritis pada ayam tiren dapat dilihat dari beberapa tanda antara lain (1) warna kulit ayam putih kelabu dan terkadang agak kebiruan. (2) Kulit tidak halus, karena lubang bekas cabutan bulu tidak menutup lagi akibat sel dan jaringan kulit sudah mati serta (3) sendi-sendinya tidak elastis. Kemudian (4) warna daging kemerahan sampai merah tua, karena darah tidak keluar. Terkadang ada warna gelap pada lipatan sayap atau paha, karena darah tidak keluar; (5) bau tidak sedap semakin lama semakin membusuk; (6) harga relatif murah dibanding dengan ayam normal di pasaran. Juga (7) tidak ada bekas penyembelihan di leher. Jika adapun tidak lebar (seperti bekas tusukan) saja dan tidak ada bekas kontraksi otot, (8) daging agak berlendir/berair dan (9) danyak dihindangi lalat.

Pelanggan Tetap

Pedagang ayam tiren ini biasanya sudah mempunyai pelanggan tetap, sehingga rahasia bisa terjaga karena saling menguntungkan. Jika hal ini tidak ada

pengawasan secara mendadak, maka kemungkinan hal ini akan menguntungkan dua pihak. Tetapi membahayakan bagi masyarakat luas.

Untuk mengelabui konsumen, ayam tiren ini biasanya dimasak dengan ke arah gelap misal dibacem atau dibumbu kuning dengan bumbu yang relatif lebih banyak. Namun bagi konsumen yang jeli akan tetap dapat merasakan daging yang tidak normal ini. Rasa ayamnya tidak gurih khas rasa ayam. Dalam olahan agak sulit untuk membedakannya. Salah satu tanda yang dapat dikenali adalah warna lebih gelap dan mudah busuk. □

**) Ir Henny Krissetiana Hendrasty MP, Dosen Institut Pertanian (Intan) Yogyakarta, Anggota Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) Cabang Yogyakarta*

Pojok KR

Penerapan pidana mati perlu diper-timbangan.
-- Supaya tidak ada lagi yang be-rani korupsi.

DIY berpotensi hujan lebat.

-- Waspada! ancaman bencananya.

Pemkot catat ada peningkatan kasus Covid
-- Disiplin prokes perlu terus di-ingatkan.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Musbahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmri Sustuti, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkyk23@yahoo.com, iklandrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' .. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display.. Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) .. Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%